UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI

Efektivitas Aplikasi (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo

Oleh:
Rizqillah Dita Aviana (222020100017)

Dosen Pembimbing:
Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2026

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Sedarmayanti:2017). Dalam rangka menjaga motivasi, kinerja, serta profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menetapkan sistem pembinaan karier yang salah satunya diwujudkan melalui kenaikan pangkat.

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai SDM pada instasi pemerintah sangat besar dalam pengelolaan pemerintahan dan kebijakan yang telah disusun, serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Maka dari itu, diperlukan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik. Beberapa bentuk manajemen ASN yang dimaksudkan, yaitu pangkat dan jabatan, serta promosi. Hal tersebut dapat menjadi dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya untuk negara dan masyarakat

- Menurut Undang-Undang No. 5/2014 menyebutkan bahwa kebijakan termasuk di antara kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, sistem pensiun PNS, pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antar instansi.
- Menurut pasal 27 dalam UU ini KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara asil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
- Pemerintah No 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah. No 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pangkat adalah kedudukan yang menujukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengkajian.

SIPEKAT

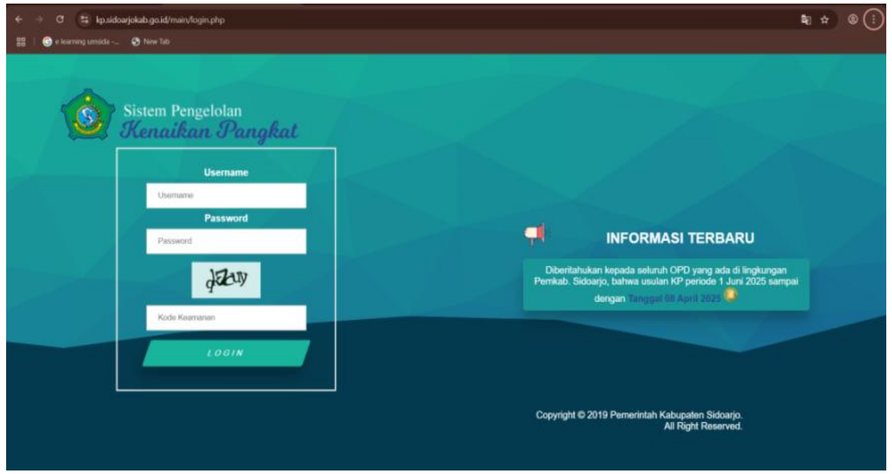

Sumber : https://kp.sidoarjokab.go.id/main/login.php

Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT), sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mempercepat proses kenaikan pangkat secara digital dan paperless. Melalui SIPEKAT, proses pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilakukan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan, meminimalisir kesalahan data, dan mengurangi waktu proses administrasi.

Aplikasi SIPEKAT yang dilengkapi dengan fitur empat fungsi utama, yaitu Pengajuan usulan kenaikan pangkat secara online; Unggah dan verifikasi dokumen persyaratan; Monitoring status dan komunikasi antara BKD dengan OPD; dan Pengelolaan arsip digital serta penerbitan SK kenaikan pangkat.

DATA

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pengusulan Kenaikan Pangkat Pada Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Pengusulan ASN	Pengusulan berhasil Diproses	Pengusulan tidak berhasil diproses
2023	2.770 berkas	2.708 berkas	62 berkas
2024	3.240 berkas	3.165 berkas	75 berkas

Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo 2025

Berdasarkan data pengusulan kenaikan pangkat ASN tahun 2023–2024, jumlah pengusulan menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan semakin optimalnya pemanfaatan sistem layanan kepegawaian berbasis elektronik yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan juga terjadi pada jumlah pengusulan yang berhasil diproses, dengan tingkat keberhasilan sekitar 95%, yang mencerminkan efektivitas sistem administrasi, mekanisme verifikasi, dan koordinasi antarperangkat daerah. Namun demikian, meningkatnya jumlah pengusulan yang tidak berhasil diproses menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas pengajuan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas kelengkapan dan ketepatan administrasi pengusulan.

PENDAHULUAN

Permasalahan

Meskipun aplikasi SIPEKAT (Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat) telah diterapkan sebagai langkah digitalisasi layanan kepegawaian di BKD Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program.

Masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem, keterbatasan sarana pendukung, serta ketidaktelitian dalam pengisian dan pemeriksaan berkas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas SIPEKAT berjalan sesuai tujuannya serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilannya.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan aplikasi SIPEKAT dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo serta kendala apa saja yang menghambat optimalisasi implementasinya?

Tujuan

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program kenaikan pangkat melalui penggunaan aplikasi SIPEKAT di BKD Sidoarjo serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas dalam program kenaikan pangkat melalui penggunaan aplikasi SIPEKAT di BKD Sidoarjo.

PENELITIAN TERDAHULU

Fitria Fatimah Sakina dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2025) “Efektivitas Aplikasi E-Buddy dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Pemerintah Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah meningkatkan kinerja pegawai, terutama dalam efisiensi kerja dan pengelolaan administrasi secara digital. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala berupa gangguan teknis, ketidakstabilan jaringan internet, dan kemampuan adaptasi pegawai yang belum merata, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan dan dukungan berkelanjutan.

Nurul Fahtika Sari (2018) “Implementasi Layanan Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa SIPEKAT berhasil meningkatkan efisiensi proses pengajuan kenaikan pangkat bagi PNS, dengan 703 PNS menerima SK pada 2017. Meskipun ada tantangan terkait SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang IT, pelatihan yang diberikan telah meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem ini.

Suherman (2022) “Efektivitas Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tabalong”

Hasil temuan penelitian ini yaitu faktor yang menjadi kendala pada pada pelayanan kenaikan pangkat di BKPP Tabalong yaitu Pengelola Kepegawaian SKPD mengabaikan surat pemberitahuan usul pangkat khususnya jadwal pengusulan dan syarat Yang diminta, kurang teliti dalam pemeriksaan berkas baik dari pihak pemberi layanan dan jugab dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat, kurangnya kelengkapan berkas dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan tujuan mengganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program kenaikan pangkat melalui penggunaan aplikasi SIPEKAT serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas dalam program kenaikan pangkat melalui penggunaan aplikasi SIPEKAT di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Lokasi Penelitian

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

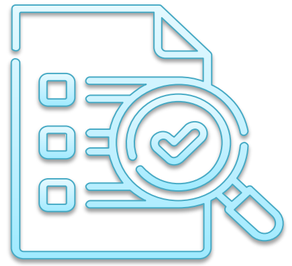

Fokus Penelitian

Efektivitas Aplikasi Sistem Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

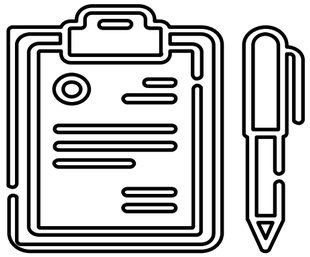

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

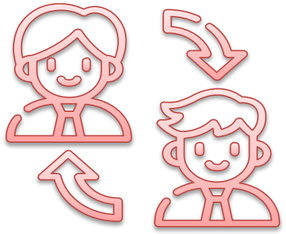

Teknik Penentuan Informan

Teknik *Purposive Sampling*. Menetapkan informan yaitu Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Sarana, Staf Penggelola SIPEKAT, serta Admin OPD.

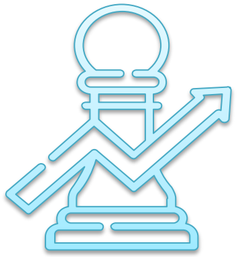

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:20) dengan empat alur:

1. Pengumpulan data;
2. Reduksi data;
3. Penyajian data;
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menganalisis efektivitas aplikasi SIPEKAT dalam meningkatkan optimalisasi pengajuan kenaikan pangkat ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori Efektivitas kebijakan Edy Sutrisno (2007). Teori ini digunakan untuk melihat keberhasilan efektivitas kebijakan melalui tiga indikator utama, yaitu: pemahaman program, tepat waktu, dan pencapaian tujuan. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauhmana pemerapan SIPEKAT mampu mendukung efektivitas pengajuan kenaikan pangkat ASN di lingkungan BKD Kabupaten Sidoarjo.

PEMAHAMAN PROGRAM

Pemahaman program merupakan indikator pertama efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SIPEKAT sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman pengguna terhadap alur, prosedur, dan fitur sistem dalam proses pengusulan kenaikan pangkat ASN. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya meningkatkan pemahaman pengguna melalui bimbingan teknis (bimtek), layanan konsultasi, serta penerbitan surat edaran yang memuat prosedur pengajuan, persyaratan administrasi, dan tahapan verifikasi dokumen. Meskipun demikian, hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa pemahaman pengguna belum sepenuhnya merata karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sosialisasi yang berkelanjutan, anggaran, waktu, sumber daya manusia, serta perbedaan tingkat literasi digital di kalangan ASN dan admin OPD. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian operator, khususnya admin OPD yang baru maupun yang berusia di atas 50 tahun, masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SIPEKAT dan memerlukan pendampingan dalam proses penginputan serta pengunggahan dokumen. Selain itu, keterbatasan kompetensi teknologi informasi juga terlihat dari masih sedikitnya staf pengelola SIPEKAT yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan pelatihan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman pengguna, efektivitas implementasi SIPEKAT masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan agar kesalahan dalam pengelolaan data usulan kenaikan pangkat dapat diminimalkan.

PEMAHAMAN PROGRAM

Gambar 1.2: Sosialisasi SIPEKAT di BKD Kabupaten Sidoarjo
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo 2025

TEPAT WAKTU

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007) yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi aplikasi SIPEKAT di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mampu mendukung percepatan proses pelayanan kenaikan pangkat ASN. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pengajuan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) umumnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 15–20 hari kerja apabila tidak terjadi kendala teknis pada sistem. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi melalui SIPEKAT telah menyederhanakan alur administrasi, mempercepat proses penginputan, verifikasi, dan validasi berkas, serta mengurangi waktu pelayanan dibandingkan mekanisme manual sebelumnya. Meskipun demikian, efektivitas ketepatan waktu masih dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, terutama kualitas jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan kompatibilitas aplikasi pada beberapa peramban, serta insiden *system downtime* yang sesekali menghambat proses pengunggahan dan verifikasi dokumen.

TEPAT WAKTU

Tabel 1.2 Fasilitas Bidang Pengembangan Karir dan Kinerja
Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo, 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	11	Baik
2.	Printer	7	Baik
3.	Scanner	2	Baik
4.	Jaringan Internet	1	Kurang Stabil

Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo, 2025

TEPAT WAKTU

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan teknis dan literasi digital pelaksana, sehingga dalam kondisi tertentu admin OPD masih bergantung pada bantuan staf BKD untuk menyelesaikan kendala yang muncul. Walaupun telah tersedia mekanisme *helpdesk*, penanganan terhadap permasalahan yang bersifat kompleks masih membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari. Di sisi lain, tersedianya perangkat komputer, scanner, printer, dan fasilitas pendukung lainnya telah membantu kelancaran proses administrasi berbasis digital, sedangkan kualitas jaringan internet menjadi faktor yang paling menentukan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan admin OPD yang menunjukkan bahwa stabilitas jaringan dan minimnya gangguan pada aplikasi berpengaruh langsung terhadap kecepatan pengunggahan berkas serta penyelesaian proses pengajuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator ketepatan waktu pada implementasi SIPEKAT secara umum telah terpenuhi karena pelayanan kenaikan pangkat dapat diselesaikan sesuai target waktu, namun optimalisasinya masih memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan sistem secara berkala, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar proses pelayanan dapat berlangsung secara lebih konsisten dan efisien.

TERCAPAINYA TUJUAN

Tercapainya tujuan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan penerapan aplikasi SIPEKAT dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SIPEKAT telah mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan kenaikan pangkat ASN melalui digitalisasi proses administrasi, sehingga pengajuan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik dan interaksi tatap muka dengan BKD. Seluruh tahapan pengajuan dilakukan secara elektronik melalui pengunggahan dokumen dalam bentuk *softcopy*, penyimpanan berkas secara *paperless*, serta pemantauan status usulan secara *real-time*, yang memberikan kemudahan bagi ASN dan mempercepat proses administrasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi ini telah dimanfaatkan secara luas dengan jumlah pengajuan mencapai ribuan ASN setiap periode dan sebagian besar berhasil diproses hingga penerbitan kenaikan pangkat. Meskipun demikian, masih terdapat usulan yang tidak dapat diproses karena sebagian ASN mengajukan kenaikan pangkat sebelum memenuhi persyaratan administratif, seperti masa kerja dan periode pengusulan, sehingga berkas harus ditolak pada tahap verifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SIPEKAT tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh tingkat pemahaman pengguna terhadap mekanisme dan persyaratan pengajuan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta pemahaman ASN mengenai prosedur kenaikan pangkat masih diperlukan agar tujuan penerapan SIPEKAT dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Aplikasi SIPEKAT dalam pengelolaan kenaikan pangkat ASN di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa sistem ini telah berfungsi sebagai instrumen pelayanan berbasis digital yang mendukung proses pengajuan kenaikan pangkat secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Melalui SIPEKAT, BKD pada prinsipnya mampu menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, paperless, serta memudahkan ASN dalam melakukan pengajuan dan pemantauan status berkas secara *real-time*. Namun, tujuan utama efektivitas sebagaimana dikemukakan dalam teori Edy Sutrisno (2007) belum sepenuhnya tercapai, karena masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan, error pada aplikasi, keterbatasan integrasi sistem, serta rendahnya kemampuan literasi digital sebagian ASN dan admin OPD yang menyebabkan proses pengajuan belum berjalan optimal secara merata. Ditinjau dari indikator efektivitas Edy Sutrisno, pemahaman program, ketepatan waktu, dan tercapainya tujuan program secara umum telah berjalan cukup baik, tetapi masih ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahaman ASN terhadap persyaratan kenaikan pangkat, ketidaktelitian dalam penginputan data, serta keterbatasan fasilitas pendukung yang memengaruhi kelancaran pelayanan. Dengan demikian, penerapan SIPEKAT di BKD Kabupaten Sidoarjo telah mampu mewujudkan pelayanan kenaikan pangkat yang lebih modern dan praktis, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan pada aspek sumber daya manusia, pendampingan teknis, serta penguatan infrastruktur teknologi agar tujuan pelayanan kepegawaian dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

[1] D. A. Tambunan, “Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru,” pp. 1–140, 2021, [Online]. Available: http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8213%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8213/1/197121028.pdf

[2] B. Lubis, “Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Indonesia: Sebuah Konsep Manajemen Publik Baru,” *Papatung J. Ilmu Adm. Publik, Pemerintah. dan Polit.*, vol. 3, no. 3, pp. 53–60, 2020, doi: 10.54783/japp.v3i3.315.

[3] I. F. Azmi and D. Marendeng Timang Palin, “Penyusunan Sop Pengelolaan Layanan Kenaikan Pangkat Reguler Dan Pilihan Pada Bkd Provinsi Sulawesi Selatan,” *Admit J. Adm. Terap.*, vol. 1, no. 1, pp. 72–88, 2023, doi: 10.33509/admit.v1i1.1888.

[4] N. Nurhafizah and M. Maryani, “Implementasi Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS Secara Elektronik pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru,” *MOTEKAR J. Multidisiplin Teknol. dan Arsit.*, vol. 1, no. 2, pp. 201–215, 2023, doi: 10.57235/motekar.v1i2.1022.

[5] J. Raranta, “Analisis Pelayanan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Utara,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 4, no. 2, pp. 24–29, 2022, doi: 10.53682/administro.v4i2.5711.

[6] P. Sipekat, D. I. Badan, and K. Daerah, “Efektivitas layanan sistem pengelolaan kenaikan pangkat (sipekat)di badan kepegawaian daerah kabupaten sidoarjo provinsi jawa timur,” pp. 1–12, 2016.

[7] U. M. Magelang, T. Digital, L. Publik, and K. Agama, “Transformasi digitalisasi administrasi melalui kepemimpinan adaptif untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di kua salaman magelang,” pp. 1–11, 2024.

REFERENSI

[8] F. F. Sakinah and I. U. Choiriyah, “The Effectiveness Of The E-Buddy Application In Improving Employee Performance In The Larangan Village Government Candi District Sidoarjo Regency [Efektivitas Aplikasi E-Buddy Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo],” pp. 1–14.

[9] Nurul Fahtika Sari and Eva Hany Fanida, “(SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo,” *J. Publika*, vol. 6, no. 1, 2018.

[10] M. Suherman, “Efektivitas Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tabalong,” *J. Adm. Publik dan Pembang.*, vol. 4, no. 1, p. 26, 2022, doi: 10.20527/jpp.v4i1.5194.

[11] J. Teknologi *et al.*, “Metodologi Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Konsep Pembelajaran Biologi : Sebuah Analisis Perbandingan Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP),” vol. 3, no. 2, pp. 883–890, 2025.

[12] S. Hermawan and W. Hariyanto, *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif dan Kualitatif)*.

[13] J. Riset *et al.*, “Transformasi Digital dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat ASN,” no. November, 2025.

[14] S. Oktavianti, U. Brawijaya, F. I. Administrasi, and J. A. Publik, *Revitalisasi sistem informasi manajemen kepegawaian dalam pengelolaan kenaikan pangkat (*. 2018.

REFERENSI

[15] A. P. Sapk *et al.*, “Implementasi Program Berbasis Inovasi Pelayanan Kepegawaian Sistem (Studi pada Aplikasi Layanan Pensiun Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur) Zafrul Dedy Setyawan Indah Prabawati,” pp. 159–170.

[16] E. Flippo, “Manajemen Sumber Daya Manusia Eri Susan 1,” *J. Manaj. Pendidik.*, vol. 9, no. 2, pp. 952–962, 2019.

[17] A. Juliarso, “Analisis Implementasi E-Government Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis,” vol. 10, pp. 19–28, 2019.

[18] N. Rachmatullah and F. Purwani, “Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government,” vol. 12, no. 1, pp. 14–19, 2022.

[19] L. Riska and R. Anisykurlillah, “Efektivitas Kebijakan Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS di BKD Sidoarjo,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, pp. 594–605, 2025, [Online]. Available: https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17475

[20] P. Sipekat, D. I. Badan, and K. Daerah, “Implementasi Sistem Penggelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah,” vol. 4, no. 1, 2026.

UMSIDA
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI